

Prosiding

Konferensi Nasional Sosiologi VII

ASOSIASI PROGRAM STUDI SOSIOLOGI INDONESIA

Mataram, 7-9 Mei 2018



TANTANGAN KEBHINEKAAN DI ERA DIGITAL

Tim Editor:

Syafruddin (Universitas Mataram)

Sutinah (Universitas Airlangga)

Ida Ruwaida (Universitas Indonesia)

Hamidsyukrie (Universitas Mataram)

Herlan (Universitas Tanjung Pura)

Jendrius (Universitas Andalas)

Ridho Taqwa (Universitas Sriwijaya)

Siti Nurbayani (Universitas Pendidikan Indonesia)



Kerjasama:

Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia
Program Studi Pendidikan Sosiologi FKIP Universitas Mataram
Program Studi Sosiologi Universitas Mataram

Prosiding
KONFERENSI NASIONAL SOSIOLOGI VII
Asosiasi Program Studi Sosiologi
Indonesia Mataram, 07–09 Mei 2018

TANTANGAN KEBHINEKAAN DI ERA DIGITAL

Tim Editor:

Syafruddin (Universitas Mataram)
Sutina (Universitas Airlangga)
Ida Ruwaida (Universitas Indonesia)
Hamidsyukrie (Universitas Mataram)
Herlan (Universitas Tanjung Pura)
Jendrius (Universitas Andalas)
Ridho Taqwa (Universitas Sriwijaya)
Siti Nurbayani (Universitas Pendidikan Indonesia)

Kerjasama:

APSSI dan Prodi Sosiologi dan Prodi Pendidikan Sosiologi FKIP
Universitas Mataram

Diterbitkan Oleh:

Penerbit FKIP Universitas Mataram
Jl. Majapahit No.62 Mataram NTB
Tlp: 0370-623873 Fax: 0370-634751
Cetakan Pertama, Mei 2018

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved
vi + 1400. 21 x 29,7 cm.
ISBN: 978.602.1570.65.4

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahuwataala, berkat limpahan karunia dan rahmat-Nya penyusunan prosiding Konferensi Nasional Sosiologi VII berhasil diselesaikan. Konferensi yang mengambil tema *Tantangan Kebhinekaan di Era Digital* akan berlangsung daritgl 07 –10 Mei 2018, melingkupi 9 sub-tema yang cukup luas dan beragam. Karena itu penyusunan prosiding ini juga disesuaikan dengan sub-tema yang ada dalam konferensi tersebut.

Prosiding ini mencakup beberapa sub-tema, yakni:

1. Tantangan Kebhinekaan di Aras Demokrasi Lokal
2. Manajemen Konflik dalam Kebhinekaan
3. Pendidikan Kebhinekaan di Era Digital
4. Kearifan Lokal dalam Mengelola Kebhinekaan
5. Peran Media dalam Merawat Kebhinekaana
6. Perubahan Relasi Gender dan Seksualitas di Era Digital
7. Komodifikasi Kebhinekaan Budaya Indonesia Untuk Pariwisata
8. Tantangan Relasi Keberagamaan di Era Digital
9. Tantangan Etika dan Moralitas Politik di EraDigital

Atas selesainya penyusunan prosiding ini, terima kasih tak terhingga diucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung mulai dari pelaksanaan konferensi sampai penyusunan prosiding ini. Kepada pengurus pusat Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI), Rektor Universitas Mataram, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unram, paraeditor, panitia pelaksana serta semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan Konferensi Nasional Sosiologi VII dan penyusunan prosiding ini yang namanya tidak mungkin disebutkan satu-persatu, diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Mataram, 18 Mei 2018

Tim Edito

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

[Daftar Isi](#)

ii

**Manajemen Konflik pada Masyarakat Adat Lindu dalam Pelaksanaan Pembangunan
Oleh Ferdinand Kerebungu..... 914**

**Rekonsiliasi *Sintuwu Maroso* Untuk Pembangunan Perdamaian Di Poso.
Oleh Tony Tampak..... 930**

**Relasi Gender dan Seksualitas dalam Kasus Tindakan Aborsi Di Tanjungpinang.
Oleh Marisa Elsera, Emmy Solina..... 955**

**Analisis Gender Model Moser: Kebutuhan Ibu Rumah Tangga dalam Penanggulangan
HIV/AIDS.
Oleh Argyo Demartoto, Bhisma Murti, Siti Zunariyah..... 966**

**Kesenjangan Gender dalam Karir Akademik Studi Refleksifitas Atas Relasi Gender
dalam Keluarga Di Kalangan Akademisi Perempuan Di Jakarta.
Oleh Dzuriyatun Toyibah 988**

**Perubahan Relasi Gender dan Seksualitas Di Era Digital: Kajian Tentang Prostitusi Di
Kota Surakarta.
Oleh Rahesli Humsona, Mahendra Wijaya, Sri Yuliani, Sigit Pranawa..... 1008**

**Wanita Pemecah Batu; Antara Komplementer Peran Gender dan Adaptasi Ekonomi
Oleh Dwi Setiawan Chaniago dan Anisa Puspa Rani..... 1022**

**Perempuan Senaru dan Pemanfaatan Sumber Daya Lokal dalam Pengembangan Sektor
Informal Di Kawasan Wisata Taman Nasional Gunung Rinjani (Tngr).
Oleh Ika Wijayanti, dkk 1044**

Pergeseran Relasi Gender dalam Keluarga Migran Indonesia Di Era Digital

Oleh Ria Renita Abbas, Mansyur Radjab, Sakaria Toa Anwar.....1054

PERGESERAN RELASI GENDER DALAM KELUARGA MIGRAN INDONESIA DI ERA DIGITAL

Ria Renita Abbas

Sosiologi, FISIP, UNHAS

riarenita10@yahoo.co.id

Mansyur Radjab

Sosiologi, FISIP, UNHAS

radjabmansyur@gmail.com

Sakaria To Anwar

Sosiologi, FISIP, UNHAS

sakaria_anwar_ipb@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan pola relasi gender pada keluarga migran, dan masalah apa yang ditimbulkan sehubungan dengan pola relasi gender tersebut sehingga berefek pada munculnya pergeseran relasi gender dalam keluarga buruh migran Indonesia. Beberapa konsep dan teori digunakan berkenaan dengan migrasi dan relasi gender. Metode yang digunakan adalah pendekatan literatur berupa studi pustaka berdasarkan pada penelitian dan tulisan terdahulu. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa migrasi yang dilakukan baik ibu/istri atau ayah/suami dalam keluarga mengalami pergeseran pola relasi gender. Saat istri atau suami memutuskan untuk keluar menjadi buruh migran maka konsekuensinya adalah terjadinya perubahan peran yang dapat dilihat dari pergeseran relasi gender antara suami dan istri. Kita ingin membandingkan relasi gender antara buruh migran laki-laki dan buruh migran perempuan maka buruh migran perempuanlah yang lebih rentan menimbulkan dampak yang ujungnya berakhir pada disorganisasi keluarga atau perceraian. Jika terjadi perceraian maka anaklah yang menjadi korban. Sehingga dapat dikatakan bahwa apabila relasi gender dalam keluarga migran dapat dimaknai secara seimbang oleh suami dan istri maka migrasi dapat menjadi solusi yang terbaik dalam keberlangsungan keluarga, namun jika makna relasi keluarga ini adalah ketimpangan maka akan mengganggu keberlangsungan keluarga. Untuk itu kehadiran perangkat digital dapat menjadi solusi untuk meminimalisasi efek yang ditimbulkan dari pergeseran relasi sosial keluarga migran Indonesia.

Kata Kunci : Relasi Gender dan Seksualitas

PENDAHULUAN

Adanya keberhasilan pembangunan di suatu wilayah sangat didukung oleh kualitas jumlah dan struktur penduduknya. Dengan kualitas tersebut diharapkan bisa meningkatkan produktivitas dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu komponen kependudukan yang mampu

mempengaruhi jumlah dan struktur penduduk selain *fertilitas* dan *mortalitas* adalah *migrasi* penduduk. Setiap orang sering melakukan gerak untuk berpindah dan migrasi merupakan bagian dari gerak penduduk untuk berpindah dari satu daerah atau wilayah ke wilayah yang lain dalam jangka waktu tertentu. Hal ini disebabkan karena adanya faktor pendorong di daerah asal dan faktor penarik di daerah tujuan.

Menurut Rusli (2012), fenomena gerak penduduk dapat dianalisis baik pada tingkat makro maupun pada tingkat mikro. Kedua tingkat analisis ini bersifat komplementer bagi suatu pemahaman yang lebih baik akan fenomena tersebut di suatu daerah. Pada tingkat analisis makro sebab-sebab gerak penduduk disimpulkan dengan melihat ciri-ciri yang diperkirakan obyektif dari daerah asal dan tujuan, disamping mungkin ciri-ciri struktural dari arus gerak penduduk itu. Sedangkan analisis tingkat mikro dari gerak penduduk memusatkan perhatian pada aspek-aspek yang berhubungan dengan motivasi dan proses pengambilan keputusan.

Fenomena umum migrasi penduduk saat ini cenderung menuju pada wilayah yang memiliki fungsi dan peran yang strategis sebagai pusat pemerintahan, perekonomian, perdagangan, pusat pendidikan, pusat pelayanan kesehatan atau daerah pariwisata. Para migran lebih cenderung memilih wilayah yang dianggap mampu meningkatkan remitan dengan lebih memuaskan sehingga dapat mengalokasikannya ke daerah asal dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Sesungguhnya ada banyak pertimbangan yang menjadi latar belakang orang untuk melakukan migran, salah satunya adalah karena pertimbangan keluarga. Menurut Rangkuti (2009), keluarga inti yang terdiri atas ayah, ibu dan anak memiliki peluang bermigrasi yang lebih tinggi dari pada keluarga besar. Oleh karena itu para migran yang sudah berkeluarga akan memutuskan untuk melakukan migrasi sendiri. Hal ini dikarenakan biaya hidup yang tinggi di daerah tujuan apalagi bagi pekerja yang belum memiliki pekerjaan tetap. Keluarga ini akan melakukan upaya yang maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Dalam proses pengambilan keputusan akhirnya ditentukan siapa yang harus keluar melakukan migrasi, apakah suami atau istri.

Selain karena faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, alasan lain yang menyebabkan orang ingin melakukan migrasi karena dilatarbelakangi oleh

gaya hidup sehingga uang selalu dijadikan faktor utama dalam memenuhi keinginan yang sifatnya konsumtif. Namun alasan seperti ini kurang banyak dijadikan landasan bagi seseorang untuk bermigrasi, keputusan untuk melakukan migrasi sebagai buruh migran lebih di dorong faktor ekonomi atas keinginan untuk memperbaiki taraf hidup. Apalagi dalam era digital saat ini, memberikan peluang yang besar untuk melakukan migrasi karena adanya informasi yang dapat mempermudah akses untuk bermigrasi.

Hal yang perlu disadari hingga saat ini bahwa anggota keluarga yang bermigrasi tentunya akan membawa konsekuensi bagi relasi antara suami dan istri dalam rumah tangga. Hal tersebut terkait dengan peran yang akan diemban oleh anggota keluarga yang ditinggalkan, bahkan efek migrasi pada relasi gender seringkali kontadiktif dan menimbulkan pergeseran dalam posisi atau status suami atau istri.

Menurut Rakhmanda (2014), pola relasi antara suami dan istri yang tinggal berjauhan ternyata masih menunjukkan adanya *gender ideology* yang sangat melekat, yakni suami memiliki peran utama dalam keluarga sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi, sedangkan istri menjalankan peran pengasuhan bagi anaknya. Kemudian, peran afektif yang seharusnya didapatkan oleh anak dari ayah dan ibunya dapat digantikan oleh nenek atau keluarga besar lainnya.

Untuk itu dalam makalah ini, akan mengangkat persoalan gender dan migrasi yang dikaitkan dengan relasi gender dalam keluarga migran di Indonesia. Hal yang menjadi pokok perhatian dalam makalah ini adalah bagaimana pola relasi gender pada keluarga migran di era digital saat ini, apa masalah yang ditimbulkan sehubungan dengan pola relasi gender tersebut sehingga kita dapat memahami kendala apa sebenarnya yang dialami oleh keluarga migran.

TINJAUAN PUSTAKA

Migrasi didefinisikan sebuah perubahan tempat tinggal secara permanen atau semi permanen. Tidak ada pembatasan baik pada jarak perpindahan ataupun sifatnya (Lee, 1969). Dengan kata lain migrasi merupakan perpindahan dari tempat asal ke tempat tujuan.

BPS (Biro Pusat Statistik) telah memberikan batasan wilayah dalam mendefinisikan migrasi, yakni proses perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain melalui batas wilayah administrasi yang dapat berupa desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi. Sedangkan PBB mendefinisikan migrasi sebagai bentuk dari mobilitas geografi (*geographic mobility*) atau mobilitas keruangan (*spatial mobility*) dari suatu unit geografi ke unit geografi lainnya yang menyangkut perubahan tempat kediaman secara permanen dari tempat asal atau keberangkatan, ke tempat tujuan atau tempat yang didatangi (Rangkuti, 2009).

Mantra (2000) dalam Purnamasari (2007), menjelaskan bahwa migrasi adalah gerak penduduk yang melintas batas wilayah asal menuju ke wilayah lain dengan niatan menetap di daerah tujuan. Sedangkan mobilitas penduduk non permanen adalah gerak penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tidak ada niatan menetap di daerah tujuan.

Para migran melakukan migrasi dalam rangka meningkatkan taraf hidup migran dan keluarganya dan umumnya dianggap sebagai upaya mencari pekerjaan dengan harapan dapat memberikan pendapatan dan status sosial yang tinggi. Faktor ekonomi sebenarnya menjadi faktor utama untuk bermigrasi

Menurut Mantra (2000), migrasi adalah gerak penduduk yang melintas batas wilayah asal menuju ke wilayah lain dengan niatan menetap di daerah tujuan. Sedangkan mobilitas penduduk non permanen adalah gerak penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tidak ingin menetap di daerah tujuan. Mantra mengungkapkan bahwa orang melakukan mobilitas, diantaranya adalah teori kebutuhan dan stres. Setiap individu mempunyai beberapa macam kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, dan psikologis. Semakin besar kebutuhan tidak dapat terpenuhi, semakin besar stres yang dialami. Apabila stres sudah melebihi batas, maka seseorang akan berpindah ke tempat lain yang mempunyai nilai kefaedahan terhadap pemenuhan kebutuhannya. Perkembangan teori migrasi demikian dikenal dengan model *stress-threshold* atau *place-utility*

Sedangkan menurut Hugo (2002), salah satu faktor penting dalam migrasi yaitu adanya akumulasi material yang merupakan faktor penting dalam

memengaruhi berbagai perubahan dalam relasi sosial rumah tangga dan komunitas migran.

Ada beberapa jenis migrasi menurut para ahli kependudukan namun jenis migrasi yang sering menjadi sorotan adalah migrasi internasional yaitu migrasi yang dilakukan dengan melewati batas negara. Para migran wanita bekerja di daerah tujuan lebih banyak berada dalam sektor domestik atau jasa seperti pembantu rumah tangga sedangkan migran laki-laki atau biasa bekerja di sektor pertanian seperti kelapa sawit, konstruksi atau transportasi.

Secara umum definisi migrasi internasional adalah perpindahan atau pergerakan seseorang atau sekelompok orang dari satu negara ke negara lain, atau perpindahan lintas batas negara untuk berbagai tujuan, antara lain bekerja dan memperbaiki kehidupan yang ada di negara asalnya ke di negara tujuannya.

Fenomena awal perempuan bermigrasi terjadi pada tahun 1991 silam. Menjadi TKI atau TKW telah menjadi trend saat itu. Berdasarkan data Puslitfo BNP2TKI, jumlah TKI yang bekerja di luar negeri dari tahun 2011 hingga 30 November 2014 ada sekitar 390.473 orang, dengan bidang terbesar adalah pekerjaan domestik (31,35%). Berdasarkan dari jenis kelamin, buruh migran perempuan sebanyak 220.944 orang (57%) dan sisanya buruh migran laki-laki (169.529 orang).

Keputusan para migran untuk bekerja di daerah tujuan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adalah lebih kepada akumulasi material. Namun ternyata hal tersebut tidak sepenuhnya berjalan mulus karena ada konsekuensi yang harus mereka hadapi kaitannya dengan relasi gender dalam keluarga migran.

Relasi Gender

Istilah gender digunakan dalam upaya menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan, baik yang bersifat kodrati artinya sesuatu yang tidak dapat dipertukarkan seperti ciri-ciri fisik maupun bersifat sebagai bentukan budaya atau konstruksi sosial. Konsep gender ini sangat membantu dalam menggambarkan pembagian kerja yang dinamis. Adanya konsep gender secara sosial telah menghasilkan perbedaan peran, fungsi, status dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dan tertanam melalui proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Jadi gender merupakan hasil kesepakatan yang dibentuk oleh manusia sehingga sifatnya variatif dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu waktu ke waktu yang lain, artinya dapat berubah dan dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan tergantung waktu dan budayanya.

secara umum relasi gender dapat dimengerti sebagai relasi-relasi antara kaum perempuan dan laki-laki yang bervariasi menurut kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Kerangka analisis gender berdasarkan dimensi hubungan dinyatakan bahwa hubungan sosial itu dapat terjadi terkait dengan kegiatan dan sumberdaya yang ada pada berbagai tingkatan, salah satunya adalah hubungan sosial pada level keluarga. Hubungan sosial tersebut akan menghadapi masalah karena adanya ketidaksetaraan gender dalam hal sumberdaya, tanggung jawab dan kekuasaan. Relasi gender merupakan hubungan sosial secara timbal balik dalam masyarakat juga dalam kebudayaan, yang kemudian menentukan batas-batas dari feminim dan maskulin , dengan kata lain memutuskan apa saja yang dianggap bersifat kewanitaan dan bersifat kekelakian. Beberapa hal yang mencakup hubungan tersebut atau relasi sosialnya adalah bagaimana sesuatu itu berjalan, siapa melakukan apa, siapa mendapatkan apa dan siapa menguasai apa.

Menurut Scanzoni & Scanzoni (1981) hal yang sering dipakai untuk mengukur kekuasaan dalam hubungan suami istri adalah dengan melihat siapa yang menjadi pengambilan keputusan. Siapa yang sesungguhnya yang lebih dominan dalam hubungan tersebut. Ada empat pola relasi suami-istri menurut Scanzoni & Scanzoni yaitu;

1. Owner Property

Pada pola perkawinan ini istri merupakan milik suami sama seperti uang dan barang berharga lainnya. Kewajiban suami adalah mencari nafkah dan istri adalah menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anak serta menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga yang lain karena suami telah bekerja untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Pada pola perkawinan ini, istri dianggap sebagai perpanjangan suami dan kewajiban utamanya adalah mengurus keluarga atau rumah tangga. Dengan kata lain, suami adalah bos atau pemimpin dan istri harus patuh

kepadanya karena suami merupakan pencari nafkah sehingga dianggap lebih memiliki kekuasaan ataupun wewenang dibandingkan istri. Hal ini mengakibatkan adanya ketergantungan istri terhadap suami. Jika dilihat dari status sosial maka dapat dikatakan bahwa status sosial istri akan mengikuti status sosial yang dimiliki oleh suaminya.

2. Head-Complement

Pada pola perkawinan ini istri dianggap sebagai pelengkap suami. Dalam hal ini suami diharapkan untuk memenuhi kebutuhan istri yakni akan cinta dan kasih sayang, kepuasan seksual, dukungan emosi, teman, pengertian dan komunikasi yang terbuka. Suami-istri mengatur kehidupan rumah tangganya secara bersama-sama. Kewajiban suami tetap menjadi pencari nafkah dan istri mengurus keluarga atau rumah tangga serta mendidik anak-anak. Namun, mereka dapat merencanakan kegiatan untuk mengisi waktu luang bersama-sama, seperti suami bisa saja membantu istri untuk mencuci piring atau menidurkan anak disaat suami memiliki waktu luang. Sedangkan kewajiban yang dimiliki istri selain mengatur rumah tangga yaitu memberikan dukungan kepada suami sehingga suaminya mampu mencapai kemajuan serta kesuksesan dalam pekerjaan dan karirnya. Pada pola perkawinan ini istri memiliki kesempatan untuk dipertimbangkan keinginannya oleh suami sebagai pelengkap, walaupun keputusan tetap berada di tangan suami. Seorang istri juga memiliki kewajiban sebagai cerminan suami yang mampu memahami posisi dan martabat suaminya, baik dalam tingkah laku maupun penampilan fisik. Hal ini termasuk bentuk dorongan yang diberikan oleh istri terhadap suaminya agar mencapai kesuksesan dalam karirnya.

3. Senior - Junior Partner

Pada pola perkawinan ini istri sudah seperti layaknya teman bagi suami. Istri bisa saja bertugas mencari nafkah, walaupun pencari nafkah utama tetap menjadi kewajiban suami dengan begitu istri tidak lagi selalu bergantung sepenuhnya pada suami. Hal ini berdampak pada kekuasaan serta wewenang yang

dimiliki oleh istri sehingga istri pun pada pola perkawinan ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam keluarga. Akan tetapi, suami masih memiliki kekuasaan yang lebih besar mengingat pencari nafkah utama tetap dijalankan oleh suami. Pada pola perkawinan ini istri diperbolehkan berkarir atau bekerja dan meneruskan pendidikannya, tetapi karir dan pendidikan tetap menjadi prioritas. Istri seringkali dikorbankan dalam hal ini. Sama halnya dengan status sosial, suami merupakan penentu dari status sosial istri dan anak-anaknya yang akan mereka sandang.

4. Equal Partner

Pada pola perkawinan ini tidak ada posisi yang lebih tinggi maupun lebih rendah antara suami dan istri atau dengan kata lain adanya posisi yang sejajar. Istri mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan suami dalam pengembangan diri sepenuhnya dan melakukan kewajiban rumah tangga. Dalam hubungan ini, baik istri maupun suami mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang dalam bidang pekerjaan maupun bidang lainnya. Keputusan yang diambil di antara suami-istri diambil berdasarkan pertimbangan atas kebutuhan dan kepuasan masing-masing. Dalam pola ini, perkembangan individu sebagai pribadi sangat diperhatikan sehingga istri bisa saja mendapatkan dukungan serta pengakuan dari orang lain karena kemampuannya sendiri dan tidak perlu dikaitkan dengan suami.

Jelasnya, dapat dikatakan bahwa pola relasi suami-istri berdasarkan pada kategori diatas terbagi atas pola relasi senior-junior partner yang diidentikkan dengan pola relasi tradisional dan equal partner yang diidentikkan dengan pola relasi yang modern. Apabila istri telah memasuki peran publik yaitu sebagai pencari nafkah dalam keluarga, maka pola relasi suami istri telah bersifat modern, apalagi peran dalam mengambil keputusan telah dimiliki pula oleh istri. Untuk kasus migrasi (baik perempuan sebagai migran atau laki-laki sebagai migran) maka pola relasi suami-istri tergolong sebagai pola relasi yang modern karena peran harus dipertukarkan.

Migrasi dan digital

Munculnya teknologi digital dapat memberikan kemudahan dalam pekerjaan, meningkatkan emosional serta dapat membangun pola-pola keterhubungan antar anggota masyarakat. Era digital membuat cair dan fleksibel ruang dan waktu dalam sebuah hubungan sosial dan pribadi (Green dan Singleton 2015). Menurut Ling (2004) bahwa ponsel atau telepon genggam adalah salah satu teknologi paling efektif dalam menjalankan teknologi digital. Ponsel telah dikonseptualisasikan sebagai teknologi konektivitas serta teknologi keamanan dan emansipasi yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan rekan bahkan sampai relasi ke luar negeri tanpa batasan ruang dan waktu (Ling 2004).

Era Digital merupakan fenomena sosial yang disadari atau tidak, setuju atau tidak sudah menjadi bagian dari kehidupan setiap individu. Kehidupan sosial sudah dikonfigurasi melalui dan dengan teknologi. Teknologi digital telah memainkan peran utama dalam sebuah relasi sosial termasuk dalam relasi gender. Oleh Lupton (2015) menganggap bahwa teknologi digital menawarkan cara alternatif untuk mempraktikkan kehidupan sosial. Beberapa sosiolog berpendapat bahwa jika kehidupan sosial, ekonomi dan politik telah semakin banyak dialami dan melalui teknologi digital, jika kita ingin mengetahui kehidupan ini, kita harus memikirkan kembali praktik sosiologis (Ruppert et al. 2013).

Keterkaitan antara migrasi dan digital juga sangat erat terutama dalam menjalankan relasi sosial antar berbagai individu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lu Wei dan Fengfang Gao (2016) mengungkapkan bahwa migran urban ini semakin bergantung pada media baru, terutama media sosial untuk berita, hiburan, dan interaksi sosial serta kehadiran media digital dapat berkontribusi pada integrasi sosial mereka, termasuk membangun identitas sosial dan jaringan sosial serta partisipasi sosial dunia nyata.

Fakta-fakta tentang gender dan migrasi

Ada beberapa kasus yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan gender dan migrasi ini. Kasus dapat kita cermati melalui beberapa tulisan yang merupakan hasil

penelitian yaitu penelitian dari Togiaratua Nainggolan mengenai perubahan pola relasi gender keluarga migran. Lokasi penelitian diutamakan pada wilayah yang menjadi pemasok utama tenaga kerja wanita (TKW) ke luar negeri seperti Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Lampung.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ada beberapa daerah menganggap bahwa perempuan yang bermigrasi dianggap terhormat dan memiliki level yang tinggi dibandingkan dengan perempuan yang tidak bermigrasi. Keberadaan buruh migran telah dianggap sebagai hal yang lazim karena ia adalah seorang pekerja keras dan berjuang untuk keluarga. Walaupun demikian, ada juga pandangan lain yang menganggap buruh migran adalah pekerjaan yang rendah bahkan dilihat sebagai perempuan yang tidak benar dan mendapatkan cap negatif. Secara positif, orang menganggap bahwa menjadi buruh migran adalah solusi untuk beberapa persoalan terutama dalam hal ekonomi, oleh karenanya perempuan telah dianggap menjadi solusi bagi persoalan ekonomi keluarga, Namun demikian perempuan tetap tidak terlepas dari perannya yang dianggap sebagai pengasuh dan pengurus rumah tangga.

Selain itu, adapula kasus lain yang dapat digambarkan terkait dengan persoalan relasi gender pada keluarga migrasi adalah penelitian dari Wini Tamtiari yang berjudul dampak sosial tenaga kerja ke Malaysia. Masalah yang difokuskan dalam penelitian ini adalah keberlangsungan keluarga atau istri dan anak saat ditinggalkan suami (ayah) yang bermigrasi ke Malaysia. Artinya jika kasus sebelumnya adalah migran perempuan atau TKW maka migran pada penelitian Wini Tamtiari adalah migran laki-laki. Lokasi penelitiannya adalah di desa Pringgading Kabupaten Lombok Timur. Fakta yang dimunculkan dalam penelitian tersebut adalah bahwa dalam pengambilan keputusan untuk migrasi ke Malaysia, istri mengaku tidak terlalu dimintakan persetujuannya karena suami hanya menyampaikan maksudnya dan istri tidak bisa apa-apa walaupun pada dasarnya keberatan.

Pada penelitian ini menggambarkan secara umum bahwa migrasi ke Malaysia memiliki dampak yang positif dalam hal pemenuhan materi karena dapat memperbaiki taraf ekonomi keluarga namun secara nonmateri dianggap memberikan dampak yang negatif yaitu terjadinya perubahan akibat adanya tekanan psikologi

rumah tangga, perubahan struktu sosial, norma, sosial, budaya dan sebagainya, atau dikenal dengan istilah *family disruption*. Perubahan ini menyangkut sistem pembagian tugas dalam rumah tangga dan status kepala keluarga yang berkewajiban menghidupi seluruh anggota rumah tangga. Dengan perginya suami atau ayah bermigrasi maka peran suami dalam keluarga dibebankan kepada ibu atau istri. Perubahan tersebut membuat istri selain bekerja secara domestik di rumah tangga juga terpaksa bekerja mencari nafkah karena remitten yang dikirim oleh suami yang bekerja di Malaysia tidak dapat sepenuhnya diharapkan. Kondisi ini diperparah lagi dengan image yang melekat pada diri para istri sebagai janda Malaysia atau disingkat dengan istilah *jamal*. Artinya sorotan dari masyarakat tersebut menimbulkan dampak psikologis tersendiri bagi para istri yang ditinggalkan oleh suami yang bekerja di Malaysia. Selain beban pekerjaan yang harus dijalani, istri juga berperan dalam mengambil keputusan. Secara umum dapat dikatakan bahwa adanya keputusan suami untuk bermigrasi maka menimbulkan beban pekerjaan bagi istri dan juga beban perasaan karena harus jauh dari suami, sehingga seiring dengan perkembangan waktu, perilaku migrasi tenaga kerja ke Malaysia ini ternyata telah menyebabkan meningkatnya kasus perceraian dan poligami.

Penelitian Daulay (2001) yang berlokasi di Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat mengungkapkan bahwa pada keluarga migran mengalami perubahan pola hubungan gender antara pasangan suami-istri. Istri sudah memiliki posisi tawar di dalam keluarga karena istri berperan sebagai pencari nafkah. Dalam aspek pengambilan keputusan, seperti untuk pendidikan anak, pemanfaatan uang, pembelian alat rumah tangga dan kebutuhan pokok dan lain sebagainya, istri memiliki peranan yang besar di dalamnya. Begitu juga dalam hal pembagian kerja, pasangan suami-istri keluarga migran ini sebagian besar mengaku tidak lagi membagi peran tersebut berdasarkan gender. Seperti halnya, tugas mengurus anak dan memasak yang biasanya dikerjakan oleh istri, namun pada keluarga migran dikerjakan oleh suami. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa penelitian pada keluarga migran ini, istri merupakan pihak pelaku migrasi, seiring dengan perannya yang berubah menjadi pencari nafkah dalam keluarga

maka terjadi perubahan juga dengan pola hubungan gender pada keluarga tersebut.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningsih (2013) yaitu ekonomi keluarga menjadi alasan utama para buruh migran perempuan melakukan migrasi ke luar negeri. Kemudian, terdapat perubahan dalam pembagian kerja pada keluarga buruh migran perempuan tersebut. Sebelum pihak istri melakukan migrasi ke luar negeri, pembagian kerja di antara pasangan suami-istri tersebut jelas yaitu suami berperan sebagai pencari nafkah atau menjalankan peran publik dan istri berperan sebagai ibu rumah tangga atau menjalankan peran domestik. Kemudian, setelah pihak istri melakukan migrasi ke luar negeri maka terjadi perubahan peran yaitu istri menjalankan peran publik sebagai pencari nafkah utama, sedangkan suami menjalankan peran domestik dengan mengurus anak mereka.

METODE PENELITIAN

Pada tulisan ini menggunakan data sekunder dengan pendekatan literatur yakni berupa studi pustaka sebagai upaya menganalisa tentang pergeseran relasi gender dalam keluarga migran Indonesia di era digital. Penggunaan literatur merupakan salah satu metode yang digunakan berdasarkan pada tinjauan terdahulu yakni tulisan atau penelitian yang telah dilakukan untuk memberikan gambaran terhadap permasalahan yang dihadapi. Untuk itu tipe penulisan ini lebih bersifat deskriptif.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana telah ditampilkan beberapa fakta-fakta yang berkenaan dengan pola relasi gender dalam keluarga migran maka terdapat adanya pergeseran yang menimbulkan konsekuensi relasi gender dalam keluarga migran. Dari gambaran fakta di atas memperlihatkan bahwa sistem patriarki yang mendominasi hampir seluruh nilai sosial budaya di Indonesia dengan posisi suami sebagai pihak yang paling mendominasi mengalami pergeseran peran. Artinya bahwa nilai-nilai feminitas dan maskulinitas tidak lagi diinterpretasikan secara kaku. Baik suami

maupun istri memiliki pemahaman yang sama akan kondisi yang memaksa mereka harus menjadi migran, hanya saja terkadang cara pelaksanaannya berbeda.

Keputusan istri untuk bermigrasi dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga menyebabkan suami akhirnya permisif dan merelakan istri untuk bekerja ke luar negeri. Dengan demikian terjadi pergeseran peran bahwa yang mencari nafkah adalah istri walaupun kepala keluarga masih tetap dipegang oleh suami. Adanya istri yang bermigrasi menyebabkan suami mengambil peran dalam sektor domestik dan pengasuhan anak. Hanya saja pengontrolan suami terhadap sektor domestik tidak terlalu ketat jika dibandingkan dengan istri karena adanya keterlibatan keluarga besar dalam membantu urusan domestik dan pengasuhan anak. Hal ini justru mengurangi kewajiban suami karena mencari nafkah adalah istri dan urusan domestik dibantu oleh keluarga besar.

Hal lain yang dapat kita perhatikan bahwa perempuan yang bermigrasi memberikan dampak yang signifikan baik terhadap lingkungan masyarakat maupun terhadap lingkungan keluarga. Perempuan mempunyai basis ekonomi sehingga memperkuat posisi perempuan dalam hal keuangan serta dengan bermigrasi memberikan pengetahuan bagi peningkatan sumber daya perempuan dalam menghasilkan ide-ide baru. Berdasarkan hal tersebut maka perempuan memiliki *power* dalam pengambilan keputusan. Dengan *power* yang dimiliki oleh perempuan akhirnya memengaruhi relasi gender dalam keluarga. Perempuan semakin diperhitungkan, utamanya dalam pengambilan keputusan di rumah tangga dan memiliki wewenang yang lebih dibandingkan laki-laki. Berikut beberapa hal yang dapat dilihat sebagai konsekuensi perempuan melakukan migrasi sehingga menimbulkan pergeseran relasi gender dalam keluarga migran.

**Tabel 1 Perubahan Pola Relasi Gender Keluarga Migran
Pasca Migrasi sebagai TKW**

No.	Keadaan sebelum menjadi TKW	Keadaan setelah menjadi TKW
1.	Pencari nafkah utama adalah suami	Pencari nafkah utama adalah suami dan isteri
2.	Suami meyakini nilai-nilai pemingitan terhadap isteri	Suami mulai permisif ketika isteri masuk sektor publik
3.	Isteri fokus terhadap sektor domestik	Isteri mulai terbuka pada sektor publik
4.	Isteri tidak independen dalam membuat keputusan	Isteri mulai independen dalam membuat keputusan
5.	Suami tidak terlibat dalam sektor domestik	Sebagian suami terjun ke sektor domestik
6.	Pembagian kerja sexist dikotomis	Pembagian kerja mulai kabur, tidak sexist dan tidak dikotomis
7.	Posisi isteri sebagai sub ordinasi sangat kelihatan	Posisi isteri sebagai mitra mulai kelihatan
8.	Pola relasi gender lebih didominasi maskulin dan feminin	Pola relasi gender mengarah pada androgini
9.	Pengasuhan anak tanggung jawab utama isteri	Pengasuhan anak mengarah pada tanggung jawab bersama
10.	Keluarga relatif harmonis	Ada konflik yang bersifat potensial dan manifest

(Sumber data : Nainggolan, 2006)

Adanya pengaruh budaya patriarkhi yang memandang laki-laki lebih berorientasi ke sektor publik dan perempuan ke sektor domestik merupakan pola relasi yang diterapkan sebelum ada perempuan melakukan migrasi, namun setelah memutuskan untuk bermigrasi pola relasi sosial tersebut akhirnya bergeser. Nampak bahwa dulu terjadi kecenderungan adanya ketimpangan kekuasaan karena pengaruh akar sosial budaya tradisional masih sangat kuat. Keterlibatan perempuan dalam aspek ekonomi masih ditentukan oleh sistem nilai adat istiadat yang pembatasannya masih berupa etika, tentang apa yang harus dan tidak seharusnya dilakukan. Perempuan ternyata sudah dipolakan pada pekerjaan yang bersifat menerima perintah sedangkan pihak yang memerintah adalah laki-laki. Konstruksi gender ini memosisikan laki-laki sebagai superioritas dan posisi perempuan adalah sub.ordinat. Hal ini mempertegas bahwa hegemoni patriarkhi melingkupi pola relasi gender lokal, sehingga pembagian kerja menjadi *sexits* (berdasarkan pada jenis kelamin) dan dibedakan dari suatu dikotomi. Adanya relasi gender menjadi perilaku spesifik yang diharapkan lalu dijadikan standar bagi perilaku laki-laki dan perempuan. Pola relasi gender ini menjadi tingkah laku yang cocok yakni kelompok

laki-laki diharapkan akan menjadi *maskulin* dan perempuan diharapkan menjadi *feminim*.

Keberadaan migrasi perempuan yang bekerja di luar negeri sebagai TKW telah mengubah pola relasi gender, dengan mempertukarkan sebagian peran yakni perempuan disektor publik dan laki-laki disektor domestik. Pergeseran peran ini semakin berpeluang terjadi karena dipengaruhi oleh adanya interaksi budaya di daerah tujuan dalam bentuk akulturasi budaya. Maka dapat dikatakan bahwa adanya perempuan yang bermigrasi (sebagai TKW) berpeluang melakukan pembongkaran pola relasi gender lokal dengan segala hegemoni patriarkhi.

Sedangkan dalam konteks laki-laki sebagai migran sangat berbeda jika dibandingkan apabila perempuan sebagai migran karena kemampuan mengakses kehidupan sosial di luar rumah tangga sepertinya tidak mengalami perubahan. Status dan peran sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah masih menjadi kewajiban laki-laki dalam keluarga dan mempunyai tanggung jawab penuh terhadap kehidupan keluarganya. Laki-laki masih memegang peran untuk memutuskan apa saja tanpa harus terlalu meminta persetujuan dari pihak istri atau perempuan. Pergeseran hanya terletak pada peran istri yang ditinggalkan oleh suami yang migran karena istri harus berperan sebagai pencari nafkah selama suami bermigrasi. Artinya, perempuan memiliki beban ganda karena selain harus berada di ranah publik juga berada dalam ranah domestik sekaligus. Jika istri memiliki pengetahuan dan mampu mengembangkan potensinya dengan baik maka istri akan mampu mengolah remiten suaminya yang bermigrasi dengan sebaik-baiknya terutama dalam meningkatkan status sosialnya di masyarakat dengan membeli beberapa macam aset seperti rumah atau tanah pertanian. Namun jika istri sangat minim pengetahuan dan tidak memiliki potensi maka secara psikologis akan selalu berada dalam ketergantungan, apalagi jika ia harus bersandar pada keluarga suami maka ruang geraknya akan dibatasi karena remiten yang dikirim oleh suami harus dibagi dua dengan pihak keluarga suami seperti ibu mertua. Selain itu terkadang istri yang memiliki pengetahuan yang rendah sangat mudah untuk dirayu dan akhirnya terbujuk oleh laki-laki lain sehingga terjadi adanya perselingkuhan.

Dalam menyikapi pergeseran pola relasi gender tersebut, hal ini tak terlepas dari peran media digital (ponsel) yang ikut memberikan pengaruh dan sebagai media komunikasi serta informasi khususnya bagi buruh migran perempuan karena dianggap dengan kehadiran ponsel tersebut wawasan perempuan semakin berkembang. Selain itu kehadiran teknologi digital ini pula dapat memudahkan akses mereka untuk tetap menjalankan fungsi sosialnya di dalam keluarga. Berdasarkan hasil penelitian dari Platt (2014) mengungkapkan bahwa kehadiran teknologi digital dapat memudahkan buruh migran perempuan dalam berkomunikasi dan dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga yang ditinggalkan. Artinya hubungan jarak jauh antar anggota keluarga tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalankan fungsi keluarga dalam kaitannya dengan relasi gender.

Masalah Relasi Gender Antara Suami Istri Keluarga Migran

Fenomena migrasi yang dilakukan baik istri atau suami pada dasarnya merupakan sebuah solusi dalam menyikapi persoalan ekonomi rumah tangga. Secara materi keputusan untuk bermigrasi adalah positif karena mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun ada beberapa konsekuensi dasar yang harus dihadapi, utamanya berkaitan dengan masalah relasi gender dalam keluarga migran.

Sistem patriarkhi merupakan sistem yang rata-rata masih dianut oleh masyarakat Indonesia. Pemahaman akan konstruksi sosial bahwa perempuan adalah penguasa domestik dalam rumah tangga menjadi bagian dalam sistem patriarkhi. Perempuan atau istri yang menjadi buruh urban menjadi pendobrak dalam memudarkan pemahaman bahwa perempuan sebagai penguasa domestik, akhirnya pemahaman ini kemudian memudar dengan ikut sertanya perempuan ke ranah publik yang seharusnya menjadi ranah bagi kaum laki-laki. sehingga memunculkan sebuah kekuasaan baru dalam rumah tangga.

Relasi gender menjadi tergeser dari pemahaman semula karena perempuan kini menjadi aktor pencari nafkah utama keluarga padahal perempuan sendiri memiliki peran sebagai penguasa domestik. Oleh karena itu, batas-batas yang menjadi peran feminis dan maskulin atau batas yang menjadi ranah publik dan domestik menjadi kabur dan tidak jelas lagi. Kekuasaan yang sebelumnya di

dominasi oleh laki-laki karena dianggap sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah kemudian menjadi tersaingi oleh perempuan karena perempuan mempunyai kekuatan ekonomi atau basic ekonomi dalam keluarga.

Menurut Rosadi (2010), jika diperhatikan secara mendalam sebenarnya pergeseran dalam relasi gender antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga migran sudah mulai nampak dan muncul, pergeseran yang perlu kita cermati sebagai pergeseran yang sifatnya temporal dan spatial yaitu dalam arti bergantung kepada determinan waktu dan lokus rumah tangganya. Pergeseran yang terjadi dalam relasi gender ini dapat dijelaskan dengan menyimak beberapa hal adalah *pertama*, dalam hal peran, perempuan sudah memiliki posisi tawar yang lebih tinggi agar perannya dalam keluarga juga dapat berbagi secara seimbang dengan laki-laki atau suaminya. Perempuan sudah mulai berperan di luar peran-peran domestik, yaitu peran di luar pengasuhan anak dan pemeliharaan rumah tangga, karena perempuan dengan bekerja ke luar negeri sudah merambah ke peran-peran produktif di ranah publik. *Kedua*, dalam dimensi akses, laki-laki dan terutama perempuan sudah berbagi akses terhadap pengelolaan sumberdaya keluarga, akses kegiatan di luar rumah tangga, terutama dalam fase bekerja dan fase setelah pulang dari bekerja di luar negeri.

Ada tiga pokok permasalahan dalam membahas tentang buruh migran perempuan, yaitu migrasi internasional, hubungan perburuhan dan perubahan struktur di dalam rumah tangga. Untuk perubahan struktur dalam rumah tangga cukup menimbulkan masalah yang serius dalam sistem keluarga di Indonesia. Perubahan ini akan sangat mempengaruhi pola relasi gender pada keluarga migran perempuan serta menimbulkan dampak dalam berbagai aspek kehidupan keluarga. Sebagaimana di sebutkan sebelumnya bahwa keberadaan perempuan di ranah publik dan domestik akan memunculkan persoalan yang mungkin tidak mustahil berdampak pada disorganisasi keluarga. Hal tersebut menjadi penentu bagaimana kekuasaan dibagikan diantara perempuan dan laki-laki dan bagaimana perbedaan penggunaan kekuasaan yang telah dibagikan itu (Daulay, 2001).

Jika kita mengkaji lebih dalam efek yang ditimbulkan oleh adanya buruh migran tersebut bahwa nampak perbedaan antara buruh migran laki-laki dan buruh migran perempuan berkaitan dengan pergeseran relasi gender dalam rumah tangga.

Pada kasus buruh migran laki-laki, dampak yang ditimbulkan tidak terlalu besar karena peran yang berubah tidak terlalu signifikan yakni masih ada batas-batas yang dianggap relevan dan bisa diterima dalam struktur rumah tangga. Walaupun laki-laki atau suami keluar untuk bermigrasi dan terpisahkan oleh jarak namun dengan kehebatan teknologi komunikasi, mereka (suami istri) masih bisa saling mengkomunikasikan perannya. Suami masih dianggap mampu untuk menjalankan perannya sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah, hanya saja masalah ada pada istri yang harus memiliki beban ganda karena selain berada dalam sektor domestik juga berada dalam sektor publik. Namun hal itu mampu dijalankan oleh istri atau perempuan sepanjang suami tetap memberikan nafkah lewat remiten yang dikirim.

Hal yang paling rawan adalah manakala istri yang harus keluar untuk bekerja sebagai buruh migran. Persoalan yang muncul adalah baik istri yang pergi dan suami yang ditinggalkan menghadapi persoalan secara sosial dan psikologis seputar peran yang harus dijalankan. Pertukaran peran sesungguhnya membawa dampak serius bagi struktur rumah tangga mereka. Secara sosial, laki-laki pada dasarnya telah memahami betul akan perannya untuk tetap eksis di luar rumah, persoalan yang muncul manakala ia harus berhadapan dengan tugas-tugas yang ada dalam rumah ditambah lagi dengan perannya mengasuh anak. Secara psikologis, peran ibu sangat mewarnai sektor domestik. Begitu pun juga dalam mengasuh anak, perhatian ibu akan lebih besar dibandingkan ayah atau laki-laki. Hal ini lah yang kemudian menyebabkan adanya konflik peran yang dirasakan oleh suami sehingga sebagian kasus memperlihatkan ketidakmampuan suami dalam mengelola rumah tangga sehingga membutuhkan adanya pihak ketiga untuk membantunya. Walaupun ada juga sebagian suami akhirnya bisa mengelolanya. Hal ini kemudian diperparah ketika istri telah memiliki kekuatan ekonomi lalu terbuka ruang dalam kemampuannya mengambil keputusan maka terjadilah pertarungan kekuasaan antara suami dan istri, yakni siapa yang berkuasa atas apa.

Persoalan lain yang muncul dari istri yang bermigrasi adalah pemanfaatan remiten yang dikirim oleh istri terkadang menimbulkan konflik. Pemanfaatan uang oleh suami digunakan untuk selingkuh bahkan kawin lagi sehingga konflik melebar

ke area keluarga luas dan memunculkan adanya persaingan dalam menikmati remiten dari istri.

Oleh karena itu jika kita ingin membandingkan relasi gender antara buruh migran laki-laki dan buruh migran perempuan maka buruh migran perempuanlah yang lebih rentan menimbulkan dampak yang ujungnya berakhir pada disorganisasi keluarga atau perceraian. Jika terjadi perceraian maka anaklah yang menjadi korban. Sehingga dapat dikatakan bahwa apabila relasi gender dalam keluarga migran dapat dimaknai secara seimbang oleh suami dan istri maka migrasi dapat menjadi solusi yang terbaik dalam keberlangsungan keluarga, namun jika makna relasi keluarga ini adalah ketimpangan maka akan mengganggu keberlangsungan keluarga.

Sesungguhnya masalah yang timbul akibat dari pergeseran relasi gender ini juga tak dapat dipungkiri sebagai salah satu akibat yang dipengaruhi oleh kehadiran teknologi digital karena keberadaan digital bagaikan pisau yang bermata dua, pada satu sisi menghadirkan sebuah kebaikan namun pada sisi lain menghadirkan sebuah efek negatif. Hal ini menjadi sebuah konsekuensi dasar bagi relasi gender keluarga migran di Indonesia.

Draf Awal Janu

KESIMPULAN

Migrasi merupakan salah satu komponen dalam demografi kependudukan selain fertilitas dan mortalitas. Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari daerah asal ke daerah tujuan. Keinginan orang untuk bermigrasi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Munculnya buruh migran yang kebanyakan berada di desa merupakan akibat dari keinginan untuk memperbaiki taraf kehidupannya. Banyak diantara mereka telah berhasil menaikkan taraf ekonomi dan status sosialnya dengan membeli rumah atau tanah pertanian, walaupun demikian ada juga yang menghadapi kendala.

Persoalan yang muncul dalam melakukan migrasi seringkali dihadapi oleh mereka yang telah menikah dan memiliki anak. Persoalan tersebut dikarenakan adanya pergeseran relasi gender dalam keluarga migran, terlepas apakah buruh migran laki-laki atau buruh migran perempuan.

Relasi gender merupakan hubungan sosial secara timbal balik dalam masyarakat dan kebudayaan yang kemudian menentukan batas-batas dari feminis dan maskulin sehingga dapat menentukan apa yang dianggap bersifat kewanitaan dan bersifat kelakian. Dalam keluarga migran, relasi gender menjadi hal yang penting dan menarik untuk diperhatikan karena menyangkut eksistensi sebuah keluarga yang saling berjauhan. Saat istri atau suami memutuskan untuk keluar menjadi buruh migran maka konsekuensinya adalah terjadinya perubahan peran yang dapat dilihat dari pergeseran relasi gender antara suami dan istri.

Dari beberapa hasil penelitian mengungkapkan bahwa adanya keputusan untuk melakukan migrasi membawa pengaruh terhadap relasi gender dalam keluarga. Salah satu upaya dalam mengatasi persoalan peran dalam keluarga adalah harus ada yang bertindak dalam menjalankan peran ganda. Jika suami yang bermigrasi maka istri harus berperan di ranah publik dan domestik namun jika istri yang melakukan migrasi maka suami yang harus melakukan peran ganda yaitu sebagai orang berada di sektor publik juga sektor domestik.

Apabila kita membandingkan antara suami yang bermigrasi dan istri yang bermigrasi maka yang cenderung menghadapi masalah adalah istri yang bermigrasi karena adanya ketidakmampuan suami dalam menguasai sektor domestik, selain itu terkadang suami merasa risih ketika istri mampu menguasai ranah publik sehingga power yang dimiliki suami tertandingi oleh power yang dimiliki oleh istri.

Terkait dengan hal tersebut, kehadiran digital merupakan aspek yang sangat penting sebagai sarana informasi khususnya dalam mengatasi masalah dalam pola relasi gender di kalangan keluarga migran. Dengan adanya perangkat digital dapat meminimalisir efek yang ditimbulkan sehingga fungsi keluarga dapat terpenuhi walaupun tidak sepenuhnya. Walaupun demikian tak dapat dipungkiri pula jika kehadiran teknologi digital membawa pengaruh pula terjadinya masalah relasi gender dalam keluarga migran khususnya keluarga migran perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Daulay, H. 2001. *Pergeseran Pola Relasi Gender di Keluarga Migran: Studi Kasus TKIW di Kecamatan Rawamarta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat* (1st ed.). Galang Printika. Yogyakarta:
- Hugo, G. 2002. *Effects kerof International Migration on the Family in Indonesia*. Asian and Pacific Migration Journal, Vol. 11, No. 1. Adelaide University.
- Rosadi I. 2010. *Konsekuensi Migrasi Internasional Terhadap Relasi Gender (Studi tentang Buruh Migran Internasional yang Telah Pulang Kembali Kepada Keluarganya, di Kecamatan Juntinyuat, Kab. Indramayu, Provinsi Jawa Barat)*. Universitas Indonesia. Depok
- Lee, ES. 1969. "A Theory of Migration" dalam JA Jackson (ed), Migration. Cambridge University Press.
- Lupton D. 2015. Digital Sociology. New York. Routledge.
- Mantra, BI.2000. Pengantar Studi Demografi.Pustaka Pelajar. Jakarta
- Nainggolan, T et al. 2006. Gender Dan Keluarga Migran Di Indonesia. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial di Departemen Sosial RI.
- Platt, et al. 2014. Migration and Information Communications Technology Use : A Case Study of Indonesian Domestic Workers in Singapore. University of Sussex Falmer, Brighton BN1 9QN, United Kingdom
- Rangkuti, Hasnani. 2009. Pengaruh Kesenjangan Penghasilan Dalam Keputusan Bermigrasi Tenaga Kerja Di Indonesia: Analisis Data IFLS 1993 dan 2000. Tesis. Depok :Program Studi Kajian Kependudukan dan Ketenagakerjaan Program PascasarjanaFakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ruppert, Law J, Savage M (2013). Reassembling social science methods: the chalange of digital device. Theory, Culture and Society , 30(4), 22-46.
- Rusli, S. 2012. Pengantar Ilmu Kependudukan. LP3ES. Jakarta
- Scanzoni, L. D. dan Scanzoni, John. 1981. Men, Women and Change: a Sociology of Married and Family (2nd ed.). McGraw-Hill Book Company. New York

Tantiari, W.1999. Dampak Sosial Migrasi Tenaga Kerja Ke Malaysia. Jurnal
Kependudukan dan Kebijakan Vol 10, No 2, Universitas Gadjah
Mada